

# KONFLIK KAMBOJA-VIETNAM DAN AKAR-AKARNYA

Kirdi DIPOYUDO

Pergolakan di Indocina dewasa ini berkisar pada sengketa Kamboja-Vietnam yang meningkat menjadi perang terbuka ketika Vietnam menyerbu Kamboja pada 25 Desember 1978, rezim Pol Pot digulingkan dan Heng Samrin diresmikan sebagai kepala pemerintah baru Kamboja. Sebagai akibat perkembangan ini, sengketa Cina-Soviet meningkat, prestise dan kredibilitas RRC sebagai pelindung Kamboja mendapat pukulan berat, Hanoi semakin bergantung pada Uni Soviet, dan akhirnya RRC menyerbut Vietnam 'untuk menghukumnya' dan terjadi perang terbuka RRC-Vietnam. Beberapa minggu kemudian tembak menembak dihentikan dan RRC menarik mundur pasukan-pasukannya, akan tetapi keadaan tetap tegang karena Vietnam bukan saja menolak tuntutan RRC agar menarik pasukan-pasukannya dari Kamboja dan Vietnam melainkan juga meneruskan operasi-operasinya untuk menghancurkan perlawanan Pol Pot. Dalam keadaan itu RRC bisa menyerbut Vietnam lagi untuk memaksanya.

Sengketa Kamboja-Vietnam itulah tema tulisan ini. Akan dibahas pula akar-akarnya karena hanya secara demikian kita akan dapat memahaminya dengan baik dan memperkirakan arah perkembangan dan prospek penyelesaiannya. Sesuai dengan itu karangan dibagi menjadi tiga : (1) akar-akar sengketa Kamboja-Vietnam; (2) sebab-sebab dan pokok-pokok sengketa Kamboja-Vietnam; dan (3) prospek penyelesaian sengketa.

## I. AKAR-AKAR SENGKETA KAMBOJA-VIETNAM\*

Dalam ulasan ini akan dibahas latar belakang sejarah permusuhan bangsa Kamboja terhadap bangsa Vietnam atau apa yang dalam arti tertentu dapat disebut dalih-dalihnya. Ulasan ini akan meliputi baik jaman kolonial, khususnya kejadian-kejadian dasawarsa 1830-an dan 1840-an, maupun periode pemerintahan Sihanouk. Akan dibicarakan pula unsur-unsur tingkah laku Kamboja di masa lampau yang dipilih untuk digunakan oleh penguasa-penguasa Kamboja. Akan disinggung bahwa pilihan-pilihan dan permusuhan-permusuhan ini dapat difokuskan pada hubungan antara Partai Komunis Kamboja dan Partai Komunis Vietnam.<sup>1</sup>

### Permusuhan Tradisional

Dalam dasawarsa 1960-an kejadian-kejadian utama dalam ingatan rakyat Kamboja adalah perang-perang melawan Vietnam, penganiayaan orang-orang Kamboja oleh orang-orang Vietnam, dan kegembiraan orang-orang Kamboja melakukan apa yang mereka sebut *Kap Yuon*, artinya 'memotong orang Vietnam'. Seorang pejabat Kamboja menulis pada tahun 1856 : "Kita berbahagia membunuh orang-orang Vietnam; kita sudah tidak takut akan mereka, betapa berkuasa mereka pun." Dia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya untuk membunuh semua orang Vietnam yang dapat mereka temukan 'dari bagian utara negeri sampai perbatasan selatan'. Suatu majalah yang sangat populer di Kamboja pada tahun 1969 memuat gambar suatu kelompok orang Kamboja abad ke-19 yang terhasut yang melambaikan senjata dan meneriakkan slogan-slogan mengenai tekad mereka untuk membunuh orang-orang Vietnam. Jadi terdapat suatu latar belakang kekerasan dan prasangka yang akan

\* Diambil dari David Chandler, "Kampuchea-Vietnam : The Roots of Sterive", dalam Malcolm Salmon, Ed., *The Vietnam-Kampuchea-China Conflicts* (Universitas Nasional Australia, Maret 1979), hal. 1-7

1 Uraian ini banyak bersumber pada kertas kerja Steve Heder, "The Historical Basis of the Kampuchea-Vietnam Conflict : The Development of the Kampuchean Communist Movement and its Relations with Vietnamese Communism, 1930-70", yang diterbitkan dalam *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 1979

saya bicarakan. Di pihak Kamboja, prasangka ini didasarkan atas persepsi mengenai tingkah laku Vietnam. Di pihak Vietnam prasangka itu sudah barang tentu didasarkan atas tekanan-tekanan Vietnam dan tingkah laku Kamboja.

Pada hemat saya alasan prasangka ini adalah sangat sederhana. Perbatasan kebudayaan antara Kamboja dan Vietnam adalah yang paling tajam di Asia Tenggara. Pada abad ke-19 dia sangat tajam. Dari satu desa ke desa berikutnya terjadi perubahan-perubahan radikal dalam hal-hal fundamental seperti gaya rambut, pakaian, pangan, arsitektur, alat-alat dapur, alfabet, sistem pendidikan, teknik-teknik pertanian, perawatan orang mati, hubungan luar negeri, sikap terhadap sejarah dan lain sebagainya di samping perbedaan bahasa.

Mengenai tingkah laku, sejarahnya menjadi sangat terperinci dalam abad ke-19: mengisi Kamboja Selatan dengan orang-orang Vietnam, melemahkan atau menghancurkan kerajaan Kamboja, dan beberapa kejadian pada awal abad ke-19 seperti invasi dan pendudukan Kamboja oleh Muangthai dan Vietnam. Dari pihak keluarga raja loyalitas bergiliran antara Muangthai dan Vietnam. Kalau seorang raja beraliansi dengan Vietnam, saingan-saingannya akan beraliansi dengan Muangthai; konflik ini akan diselesaikan dengan invasi atau pendudukan oleh kedua negara itu. Berikut ini tiga kutipan dari orang-orang Vietnam. Pada hemat saya kutipan-kutipan itu mempunyai sifat yang tidak terikat waktu yang dapat dikenal dari periode keterlibatan Amerika di Vietnam. Pada tahun 1814 kaisar Vietnam berkata : "Berkat kekuasaan kerajaan kita mereka (orang-orang Kamboja) berhasil merebut kembali negeri mereka dan mengusir musuh. Oleh sebab itu mereka sekarang harus berusaha menangani urusan-urusan demikian rupa sehingga di hari depan mereka bertindak dalam koordinasi, seperti kalau seorang mengangkat tangannya, jari-jarinya muncul dalam harmoni." Jilid ke-17 sejarah Vietnam mengatakan tentang rakyat Kamboja : "Mereka harus bekerja lebih keras, dan lebih rajin, mereka harus belajar bahasa Vietnam, dan kebiasaan-kebiasaan kita berpakaian dan makan juga harus ditiru. Kalau ada suatu

kebiasaan yang usang dan biadab yang mereka miliki, kebiasaan itu harus disederhanakan, atau disingkirkan, dan kita harus berusaha mencapai tujuan ini." Sudah barang tentu ini adalah "tugas peradaban" sekitar 50 tahun sebelum orang-orang Perancis datang untuk mengumumkan tugas peradaban mereka. Dalam jilid ke-20 sejarah tersebut terdapat suatu kalimat yang sangat familiar bagi saya dewasa ini. Suatu pemberontakan berkobar melawan Vietnam. Sehubungan dengan itu kaisar berkata : "Bangsa Kamboja, sejak takluk pada kerajaan kita, tidak mengalami kesulitan atau penindasan; mengapa rakyatnya begitu rusuh dan tidak setia kepada kita?" Dan sambil memuji raja Kamboja dalam korespondensi umum, dia mengeluh secara privat: "rakyat Kamboja selalu mengabaikan perintah-perintah kita." Sambil berkata kepada mereka di muka umum bahwa mereka telah dewasa, dia menyebutkan mereka secara privat sebagai "monyet dalam kandang dan burung dalam kurungan." Bahasa serupa itu sudah barang tentu tidak banyak membantu dialog diplomasi. Apabila semuanya ini ditambah dengan kekerasan yang menghancurkan Kamboja dalam periode 1830-1850, terdapat suatu warisan penghinaan dan kekesalan di kedua pihak, yang diperkuat oleh perasaan superioritas dan amarah berulang yang hanya sedikit berubah dari rezim ke rezim di masing-masing negara. Pemerintah Vietnam sekarang ini, apa pun perasaan sebenarnya, berusaha keras untuk mengatasi rasa superioritas itu; tetapi mengingat ingatan panjang orang-orang, penguasa-penguasa Kamboja rupanya berpendapat bahwa apa pun kata-kata mereka, penguasa-penguasa Vietnam masih percaya akan apa yang selalu dipercayanya; dan apabila mengatakan lawannya, mereka hanya bohong seperti biasanya.

Dalam periode kolonial desa-desa Vietnam di Kamboja Selatan menjadi kantong-kantong. Menjelang akhir abad ke-19 desa-desa itu biasanya katolik dan tidak mengijinkan perkawinan dengan orang-orang Kamboja setempat, berlainan dengan orang-orang Cina. Orang-orang Vietnam tidak kawin dengan bangsa lain, bahkan tidak dengan orang-orang Cina.

Bangsa Vietnam dengan cepat menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan Perancis, dan orang-orang Vietnam di Kamboja digunakan oleh Perancis dalam pemerintahan propinsi.

Dalam satu karesidenan Perancis dari 12 orang Indocina yang bekerja di bawah residen Perancis 10 orang adalah orang Vietnam dan hanya 2 orang Kamboja. Mereka ini digunakan sebagai penterjemah. Mereka bukan pegawai kantor; mereka tidak memimpin pekerjaan umum; mereka tidak ditugaskan dalam pembukuan atau riset. Mungkin saya terlalu menekankan soal ini, tetapi petani Kamboja pada dasawarsa 1930-an, sejauh mempunyai hubungan dengan penguasa-penguasa, kemungkinan besar menghadapi seorang birokrat Vietnam, bukan seorang birokrat Kamboja atau Perancis. Orang mudah menjadi kesal dengan hal itu. Koran nasionalis pertama yang terbit di Kamboja pada tahun 1936 berkeberatan dengan kehadiran orang-orang Vietnam dalam pemerintahan. Tajuk-tajuk rencana itu bukan saja tanya mengapa tidak lebih banyak orang Kamboja, tetapi juga mengapa terdapat begitu banyak orang Vietnam. Segi-segi lain tingkah laku Vietnam merupakan landasan Partai Komunis Indocina tahun 1930; kenyataannya tidak dipikirkan adanya komponen Kamboja sebelum 1951. Mengenai komponen Kamboja pada tahun 1950-an, terdapat banyak kekesalan terhadap orang-orang Vietnam di kalangan orang-orang komunis Kamboja terdapat orang-orang Vietnam dan apa yang mereka rasa sebagai penjualan oleh orang-orang Vietnam di Jenewa. Vietnam membiarkan delegasi Sihanouk menentukan seluruh hari depan Kamboja, dan tidak memberikan peranan intern kepada kaum komunis Kamboja. Mereka ini memang tidak begitu aktif, tetapi beberapa ribu di antara mereka mengalami penindasan oleh rezim Sihanouk pada 1950-an dan 1960-an. Sudah barang tentu dalam periode Sihanouk banyak terjadi bentrokan perbatasan dan pancingan Sihanouk oleh rezim Vietnam Selatan, mungkin atas dorongan Amerika. Orang-orang Vietnam di Kamboja itu sendiri menjauhkan diri dari politik Kamboja. Ini berarti bahwa rakyat setempat mencurigai mereka dan mengira bahwa mereka itu orang asing, baik katolik maupun komunis. Mungkin mereka benar. Belum pernah diselidiki, tetapi tempat-tempat di Kamboja dengan banyak orang Vietnam, seperti perkebunan-perkebunan karet dan tempat-tempat perikanan di Kampong Chanang, biasanya aktif mendukung perlawanan Vietnam. Daerah-daerah ini biasanya juga merupakan tempat di mana Partai Komunis Kamboja lebih

mudah berakar dalam periode 1945-1954 daripada di daerah-daerah lain.

### Unsur-unsur Tingkah Laku Masa Lampau

Sekarang kita beralih pada unsur-unsur masa lampau yang dipilih dan digunakan oleh rezim Pol Pot. Kata-kata ini saya gunakan dengan saksama karena sebagian besar masa lampau Kamboja ditolak sama sekali oleh rezim.<sup>1</sup> Khieu Sampan misalnya mengatakan bahwa komune-komune di Kamboja menghasilkan "segala macam noda sosial dan budaya yang kini disingkirkan". Dia berbicara tentang tahap-tahap sejarah Kamboja dari jaman perbudakan sampai pembebasan tahun 1975. Pada tahun 1977 para teoretisi komunis mendorong jaman penerangan itu 15 tahun ke belakang sampai pendirian Partai Komunis Kamboja pada tahun 1960. Karena alasan tertentu mereka mulai era mereka pada tahun AD 1. Dengan demikian terhitung 1960 tahun "perbudakan" dalam masa lampau Kamboja, suatu gagasan yang mudah dijual dan dihafalkan, tetapi tidak dapat dibuktikan.

Dalam masa lampau itu terdapat empat hal yang kiranya berguna untuk pembicaraan kita. Keempatnya dipilih dari pengalaman Kamboja yang lampau. Yang pertama ialah bahwa petani-petani telah membangun candi Angkor. Kaum komunis tidak memperinci mengapa demikian dan tidak menangani persoalan pengabdian yang sukarela sama sekali.

Kedua, petani-petani telah mengalahkan orang-orang Amerika di bawah pimpinan Partai Komunis Kamboja (PKK). Ketiga, patriotisme tradisional menuntut pembunuhan orang-orang Vietnam. *Kampuchea Dossier*, sebuah buku yang diterbitkan pemerintah Vietnam pada tahun 1978, melukiskan suatu serangan Kamboja terhadap sebuah desa Vietnam tak lama sebelumnya di mana para penyerbu datang sambil berteriak

---

1 Mengenai penolakan masa lampau itu lebih lanjut lihat David Chandler, "The Constitution of Democratic Kampuchea : the Semantics of Revolutionary Change," dalam *Pacific Affairs*, Fall 1976

*"Kap Yuon"*, yang merupakan yel tahun 1840-an. Secara ironis yel ini adalah inti nasionalisme Kamboja di bawah Lon Nol. Satu-satunya segi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahnya yang diakui oleh rakyat sebagai sah adalah bahwa dia mensponsori tingkah laku anti Vietnam.

Hal keempat yang berguna untuk pembicaraan kita ialah melihat apa yang dipilih oleh para pemimpin dalam taktik dan posisi perundingan mereka terhadap Vietnam. Hal kunci di sini ialah bahwa sejak 1954 diplomasi Kamboja berupa tuntutan agar naskah Kamboja yang telah disiapkan diterima. Orang-orang Kamboja berkata : "Inilah naskah kami; anda dapat menerima atau menolaknya; dalam naskah ini tiada fleksibilitas." Ini adalah suatu taktik yang berhasil di Jenewa pada tahun 1954 ketika wakil-wakil Kamboja terus menerus mengulangi posisi mereka tanpa perubahan. Akhirnya mereka menghabiskan tenaga orang-orang seperti Molotov, sesuatu yang tidak mudah terjadi. Kemudian Sihanouk dan rekan-rekannya mengatakan bahwa yang diperlukan untuk berhasil dalam diplomasi ialah terus menerus mengulangi tuntutan-tuntutan sampai orang-orang memberikan apa yang anda inginkan. Ini adalah kebijaksanaan Kamboja terhadap Vietnam pada 1960-an, dan waktu kuncinya ialah 1966-1967, ketika Sihanouk menuntut jaminan perbatasan. Ini berarti pengakuan peta-peta Kamboja oleh orang-orang asing. Sudah barang tentu peta-peta itu bukan tidak jujur; tetapi Sihanouk tidak mau membicarakan ketidakpastian perbatasan-perbatasan di berbagai edisi peta-peta Indocina Perancis. Apabila dia minta dukungan negara-negara, mereka memberikan atau tidak memberikannya karena berbagai alasan. Pemerintah Vietnam Selatan misalnya tidak mau memberikannya dengan berkata secara kasar : "Kami lebih suka membicarakan persoalan-persoalan ini daripada menerimanya begitu saja." Amerika Serikat menolaknya karena alasan yang sama dan berkata : "Ini bukan urusan kami — ini adalah sesuatu yang harus anda bicarakan dengan orang-orang Vietnam." Sudah barang tentu karena alasan--alasanya sendiri NLF dengan cepat menandatangani persetujuannya dan berkata : "Ya kami menerimanya."

Yang terjadi ialah bahwa Republik Sosialis Vietnam ingin mengadakan pembicaraan-pembicaraan, sedangkan Kamboja berpegang teguh pada posisi Sihanouk/NLF sambil berkata : "Anda telah menyetujuinya pada tahun 1966-1967". Republik Sosialis Vietnam adalah pemerintah yang berkuasa, bukan suatu pemerintah revolusioner. Dia harus mengambil posisi dengan berkata "kami bersedia membicarakan hal-hal ini tetapi tidak bermaksud menerima posisi anda". Ini berarti bahwa mereka menganut politik 'pengkhianatan' yang selalu dianut oleh bangsa Kamboja. Pada hemat saya suatu tragedi Kamboja ialah bahwa pemimpin-pemimpinnya rupanya tidak mampu menerima kenyataan bahwa Kamboja, paling tidak di mata bangsa-bangsa lain (atau lebih tepat kepentingan nasional Kamboja dan nasib rakyatnya), secara sederhana tidak begitu penting seperti rakyat dan kepentingan negara-negara lain. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah disadari oleh Sihanouk; dan adalah suatu kehormatan baginya bahwa dia tidak menyadarinya. Kamboja adalah negeri yang paling penting dalam pandangannya. Demikianpun dalam pandangan rezim Pol Pot. Masyarakat mempunyai hirarki seperti masyarakat manapun di Asia Tenggara sebelum 1970 dan dia tidak mau menerima kompromi atau penghinaan dalam bentuk umum mana pun.

Vietnam tidak main-main tetapi sungguh-sungguh bila berkata : "Setelah kami menolong anda begitu banyak (bantuan Vietnam tidak pernah disebutkan di muka umum), mengapa anda begitu rusuh dan tidak setia?" Mengapa mereka tidak masuk akal (seperti Amerika sering mengeluh mengenai Vietnam)? Vietnam seperti Amerika sebelum perang, tetapi tidak semunafik Amerika, menginginkan suatu "penyelesaian rasional" untuk masalah-masalah di Asia Tenggara, agar dapat melaksanakan tugas konsolidasi kemajuan mereka menyusul bertahun-tahun penderitaan. Ini tidak perlu berarti bahwa Kamboja harus menduduki tempat kedua dalam suatu federasi yang dikuasai oleh Vietnam, tetapi berarti bahwa orang-orang Kamboja harus berhenti meneriaki dan menembaki orang-orang Vietnam dan berhenti berlagak seolah-olah negeri mereka membutuhkan begitu banyak hormat. Bangsa-bangsa di dunia kini

umumnya bertingkah laku dengan lebih sedikit semangat tetapi dengan lebih banyak realisme, sedangkan rakyat Kamboja melihat ke dalam dengan ingatan yang luar biasa, sangat bangga atas kemenangan-kemenangan lampau yang mungkin tidak berarti bagi bangsa-bangsa lain tetapi sungguh-sungguh; dan pada tahun 1977 paling tidak suatu kesediaan dipaksakan oleh pemimpin-pemimpinnya yang didukung oleh sebagian rakyatnya untuk bertindak dalam gelanggang internasional, yaitu terhadap Vietnam, dengan intensitas yang sama seperti yang berhasil dalam revolusi. Pertanyaan yang muncul di sini ialah mengapa mereka berbuat demikian. Halaman-halaman berikut ini berusaha memberikan suatu jawaban.

## II. SEBAB-SEBAB DAN POKOK-POKOK SENGKETA KAMBOJA VIETNAM \*

Partai Komunis Indocina (PKI) dibentuk pada tahun 1930. Mula-mula dinamakan Partai Komunis Vietnam, tetapi tidak lama kemudian merubah namanya menjadi Partai Komunis Indocina atas anjuran Komintern. Sekalipun mengungkapkan internasionalisme proletar, nama ini cocok dengan tradisi paternalisme Vietnam terhadap Kamboja dan Laos. Dalam suatu surat awal kepada 'rekan-rekan di Kamboja', pimpinan PKI menulis bahwa "Kamboja tidak mempunyai hak atas suatu Partai tersendiri" dan bahwa "kita sama sekali tidak membayangkan suatu revolusi Kamboja yang terpisah. Hanya mungkin satu revolusi Indocina". Biarpun diakui hak penentuan diri 'penduduk-penduduk minoritas', hal ini dilukiskan dalam kerangka suatu "Uni Republik-republik Soviet Indocina".<sup>1</sup> Ini adalah pemikiran dasawarsa 1930-an.

\* Diambil dari Ben Kiernan, "Kampuchea-Vietnam : the Contemporary Conflict", dalam Malcolm Salmon, Ed., *The Vietnam-Kampuchea-China Conflicts* (Universitas Nasional Australia, Maret 1979), hal. 8-19

1 Dokumen-dokumen dari arsip Kementerian Urusan Kolonial Perancis, yang diklasifikasikan di bawah Slotfor. Lihat catatan kaki 18 Pierre Rousset, "Cambodia : Background to the Revolution," dalam *Journal of Contemporary Asia*, 7 (1977), hal. 513-538

Posisi ini diubah pada tahun 1940, ketika Sidang Pleno Kedelapan Komite Sentral PKI memutuskan "untuk menyelesaikan persoalan nasional dalam kerangka masing-masing dari ketiga negeri, yaitu Vietnam, Laos dan Kamboja, dan . . . untuk menciptakan keadaan baik bagi rakyat Kamboja dan Laos untuk mengembangkan semangat kemerdekaan dan kedaulatan . . ." <sup>1</sup> Tetapi sikap superioritas Vietnam tetap bertahan dalam PKI. Bulan Juni 1950, selama perjuangan bersenjata melawan Perancis, Komite Pembebasan Rakyat Kamboja yang disponsori oleh PKI membuka suatu sekolah latihan politik untuk kader di daerah-daerah yang telah dibebaskan dari Kamboja. Menurut Kantor Berita Vietnam, program studi meliputi kebijaksanaan politik revolusi Kamboja sebagai bagian revolusi Indocina, dan pengalaman-pengalaman revolusi Vietnam". <sup>2</sup>

Kemudian pada tahun 1951 PKI dibagi menjadi tiga partai : Partai Buruh Vietnam, Partai Revolusioner Rakyat Lao dan Partai Rakyat Kamboja. Sejak tanggal itu partai Vietnam tidak menyebutkan "Federasi Indocina" di muka umum, tetapi terus menerus menekankan perlunya suatu "hubungan khusus antara ketiga partai itu melawan imperialisme". Namun sikap-sikap lama sampai batas-batas tertentu masih bertahan. Bulan Juni 1952 Komite Kader Viet Minh di Kamboja mengemukakan bahwa "Partai Rakyat Khmer bukan pelopor kelas pekerja, tetapi partai pelopor bangsa . . ." Kalimat ini menunjukkan bahwa Partai Vietnam masih memandang rendah status Marxis-Leninis rekan Kambojanya. <sup>3</sup>

Resolusi-resolusi Konferensi Jenewa mengenai Indocina tahun 1954 memberikan suatu pukulan berat kepada kaum komunis Kamboja. Sedangkan partai-partai Vietnam dan Laos diberi daerah-daerah aman, kaum komunis Kamboja bahkan tidak diijinkan ikut dalam Konferensi. Sebagai akibatnya

- 1 *History of the August Revolution* (Hanoi : Foreign Languages Publishing House, 1972), hal. 28-29
- 2 Berita Kantor Berita Vietnam 1 Agustus 1950, yang disiarkan oleh Dinas Informasi Siaran Luar Negeri CIA Amerika Serikat dalam bahasa Inggris pada 3 Agustus 1950, EEE2
- 3 Pesan Komite Urusan Kini (Ban Thuong Vu) dari Komite Kader Viet Minh (Ban Can Su) di Kamboja, 24 Juni 1952. US Government Translation of Unclassified Captured Documents, Encl. No. 1, Desp. No. 598, from Saigon

mereka terpaksa pergi ke pengasingan, atau mengadu nasib mereka dengan pemerintah Sihanouk yang diberi kekuasaan penuh atas wilayah Kamboja. Diharapkan bahwa konsesi taktis kamp sosialis ini akan meletakkan dasar bagi kemajuan-kemajuan revolusioner yang lebih besar untuk jangka panjang dengan hanya berusaha memperkuat apa yang dianggap mungkin dalam jangka pendek. Tetapi bagi banyak orang dalam Partai Komunis Kamboja itu berarti bahwa mereka dijual.

Enam tahun berikutnya sangat merugikan Partai Rakyat Kamboja. Kader yang ditindas pemerintah mengalami nasib yang sama seperti kaum revolusioner di Vietnam Selatan yang juga dilucuti senjatanya dan ditindas oleh pemerintah Diem. Biarpun mendapat dukungan rakyat yang berarti,<sup>1</sup> Partai mengalami kekalahan dalam pemilihan-pemilihan 1955 dan 1958 sebagai akibat intimidasi pemilih oleh polisi, gangguan terhadap para calon, pembubaran rally-rally politik, pemenjaraan anggota-anggota partai dan calon-calon partai, dan sensoran koran-koran;<sup>2</sup> partai kehilangan senjata dan tidak mempunyai wilayah untuk dituju. Namun pada 1955 seorang calon Partai Khmer mendapatkan 25% suara dalam daerah pemilihannya biarpun di penjara selama seluruh kampanye pemilihan.

Konsolidasi kekuasaan dan penyingkiran partai-partai oposisi oleh Sihanouk pada 1958 berarti bahwa akan dilancarkan suatu kampanye penindasan kaum revolusioner yang bahkan lebih sengit. Redaktur koran partai dibunuh di muka umum di luar asrama militer di Phnom Penh pada tahun itu. Dalam tahun yang sama, menurut Pol Pot, 90% kader partai juga disingkirkan.<sup>3</sup> Bulan September 1960 partai secara rahasia

- 
- 1 Shihanouk mengakui bahkan pada tahun 1958 bahwa 39 dari 90 distrik Kamboja adalah "merah" atau "merah muda". Lihat "Le Communisme an Cambodge", dalam *France-Asia*, 15. 144, 145, 1958, hal. 192-206 dan 290-306
  - 2 Lihat Michael Vickery, "Looking Back at Cambodia," dalam *Westerly* (Universitas Australia Barat), 4 Desember 1976, hal. 14-28. Vickery menyimpulkan bahwa menurut International Control Commission pemilihan itu adalah wajar dan secara demikian menunjukkan pengawasan serupa itu tak banyak berarti
  - 3 Pidato di Phnom Penh pada proklamasi formal Partai Komunis Kamboja, 27 September 1977

## ANALISA

mengadakan kongres pertamanya untuk mempelajari dan menganalisa situasi yang gawat itu.

Dalam kongres itu diambil suatu keputusan untuk menganut suatu strategi politik swadaya yang baru, tanpa bergantung pada bantuan kamp sosialis, yang dalam praktek berarti partai komunis Vietnam. Son Ngoc Ming, pemimpin partai yang paling setia pada garis Vietnam, dipecat dari jabatannya. Mengingat akibat-akibat yang parah dari ketergantungan pada sarana-sarana parlementer perjuangan tanpa perlindungan kekuatan bersenjata, partai juga memutuskan untuk menyiapkan suatu pemberontakan bersenjata melawan rezim feodal dan pendukung-pendukung imperialisnya, dengan basis di daerah pedesaan. Sementara itu kaum komunis Vietnam terlibat dalam pertarungan mati-hidup dengan imperialisme Amerika. Penting bagi mereka bahwa Kamboja tidak digunakan sebagai basis dari mana mereka dapat diserang dari belakang. Dengan demikian mereka mendukung politik netral Sihanouk dalam konflik biarpun menindas komunisme di negerinya. Jelas bahwa imperialisme Amerika menempatkan partai Vietnam dalam suatu dilemma sehubungan dengan Kamboja. Dilemma ini tidak dapat diatasi secara yang memuaskan bagi partai Kamboja maupun Vietnam, dan tiada alasan untuk mengharap bahwa orang-orang Vietnam akan banyak berkorban bagi partai Kamboja, khususnya setelah partai ini menganut garis merdekanya sendiri.

Digulingkannya rezim Sihanouk pada tahun 1970 menciptakan suatu situasi baru. Aliansi Lon Nol yang baru dengan Amerika Serikat dan serangan-serangannya terhadap tempat-tempat persembunyian komunis Vietnam mengancam revolusi Vietnam, dan secara demikian membuka jalan bagi kerjasama erat antara partai Vietnam dan partai Kamboja untuk melawan rezim Phnom Penh. Namun maksud-maksud kedua partai di Kamboja tetap berlainan. Kaum komunis Vietnam ingin bebas dari gangguan sehingga dapat leluasa meneruskan serangan-serangan mereka terhadap pasukan-pasukan Amerika di Vietnam, dan bersedia menerima berkuasanya kembali Sihanouk

atau bahkan dilumpuhkannya tentara Lon Nol di daerah-daerah perbatasan. Di lain pihak, maksud partai Kamboja adalah suatu revolusi petani di Kamboja yang akan meletakkan dasar bagi suatu masyarakat yang swadaya dan sosialis. Biarpun bisa bersama-sama, maksud-maksud kedua partai itu lepas satu sama lain dan kadang-kadang bentrok.

Harus dikatakan bahwa kendati bentrokan dan persaingan itu berlangsung banyak kerjasama antara mereka, khususnya sesudah Pertemuan Puncak Rakyat Indocina di Cina Selatan bulan April 1970. Kerjasama ini sebagian besar berakhir setelah Persetujuan Paris tentang Vietnam ditandatangani awal 1973. Biarpun tidak menghasilkan genjatan senjata, persetujuan ini membebaskan banyak pesawat pembom Amerika Serikat yang sebelumnya beroperasi atas Vietnam untuk digunakan melawan tentara revolusioner Kamboja. Selama enam bulan sampai Agustus 1973, sekitar 200.000 orang Kamboja tewas atau luka-luka dalam salah satu kampanye pemboman yang paling intensif selama perang. Akan tetapi selama ini berlangsung, orang-orang Vietnam mendesak kaum komunis Kamboja untuk berunding dengan Lon Nol, lagi pula mengurangi suplai senjata mereka bagi mereka, sebagai bagian implementasi Persetujuan Paris. Kaum komunis Kamboja, yang selalu menolak untuk berunding dengan Lon Nol dan terpaksa menderita akibat-akibat tindakan Vietnam untuk mengadakan suatu persetujuan perdamaian dengan rezim Thieu, sekali lagi merasa dijual oleh partai komunis Vietnam. Laporan-laporan mengenai pertengkaran serius, khususnya mengenai suplai senjata, tertanggal dalam tahun itu.

### **Federasi Indocina**

Biarpun kaum komunis Vietnam tidak mengajukan usul 'Federasi Indocina' sejak pembubaran PKI tahun 1951, tidak diragukan bahwa mereka menginginkan lebih banyak pengaruh di Phnom Penh daripada yang disetujui oleh Partai Komunis Kamboja. Menurut Nayan Chanda : "Pengamat-pengamat di

## ANALISA

Hanoi berpendapat bahwa solidaritas Indocina adalah suatu dogma untuk Hanoi agar dapat memainkan peranan pelopor di Asia Tenggara."<sup>1</sup> Pendapat itu benar atau tidak, Nayan Chanda mengutip seorang pejabat Vietnam : "Kami menuntut suatu hubungan khusus karena dalam sejarah tiada contoh lain hubungan serupa itu seperti bila dua bangsa membagi antara mereka setiap butir beras, setiap peluru, penderitaan dan kemenangan."

Phnom Penh menginginkan suatu hubungan biasa dengan Vietnam, bukan suatu hubungan khusus, yang dibatasi radio Phnom Penh sebagai berikut : "Suatu 'persahabatan istimewa' dan 'solidaritas istimewa' adalah suatu persahabatan tanpa batas, suatu solidaritas tanpa batas."<sup>2</sup>

### Perbatasan Laut

Pada hemat saya perbatasan laut merupakan suatu faktor yang cukup penting dalam sengketa ini. Walaupun tidak terjadi pertempuran di laut atau pulau-pulau yang merupakan perbatasan maritim antara kedua negara sejak Juni 1975, ada petunjuk-petunjuk bahwa perbedaan-perbedaan pendapat yang serius mengenai perbatasan laut itu merupakan faktor kegagalan untuk berdamai pada tahap ini. Pantas dicatat bahwa persengketaan ini adalah sangat penting bagi Kamboja, bukan saja karena ada kemungkinan-kemungkinan besar menemukan minyak dan gas alam di dasar laut yang disengketakan itu, tetapi juga karena sebagian besar landas kontinen Kamboja yang tersedia disengketakan dengan Vietnam atau Muangthai, sedangkan kedua negara belakangan ini mempunyai area-area landas kontinen di mana kedaulatan mereka tidak ditantang.<sup>3</sup>

---

1 Nayan Chanda, "Anatomy of the Conflict," *Far Eastern Economic Review*, 13 Januari 1978

2 Dilaporkan dalam *Asiaweek*, 27 Januari 1978

3 J.R.V. Prescott, "Asia's Maritime Boundary Problem," dalam *Dyason House Papers* 2, 4 Maret 1976, hal. 1-4

Pada 1966 diadakan perundingan-perundingan perbatasan antara pemerintah Sihanouk, NLF Vietnam dan Republik Demokrasi Vietnam. Sebagai hasilnya, kaum komunis Vietnam bersedia mengakui bahwa pulau-pulau di sebelah utara garis Brévié — ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Indocina Perancis tahun 1939 — adalah masuk Kamboja. Mengingat ini, penolakan Vietnam untuk mengakui garis itu sebagai perbatasan internasional, tetapi semata-mata sebagai suatu garis yang membatasi 'jurisdiksi administratif dan polisi', pasti nampak akademis untuk orang-orang Kamboja. Tahun 1970 Vietnam mengumumkan versinya sendiri yang berlainan tentang perbatasan laut,<sup>1</sup> biarpun posisinya pada tahun 1978 ialah bahwa tidak dicapai persetujuan dalam perundingan-perundingan tahun 1966. Bulan Mei 1976 orang-orang Vietnam berusaha meninjau kembali perbatasan Kamboja-Vietnam, khususnya perbatasan maritimnya, dan merencanakan mencaplok sebagian besar laut Kamboja. Orang-orang Kamboja melihatnya sebagai menyalahi persetujuan (biarpun tahun 1966 tidak ada bukti bahwa telah dicapai suatu persetujuan perbatasan laut) dan menghentikan perundingan-perundingan.<sup>2</sup>

Orang-orang Vietnam setuju bahwa mereka telah mengubah sikap mereka mengenai perbatasan laut, yaitu dari pengakuan de facto garis Brévié sebagai perbatasan, sejak 1966. Nayan Chanda mengutip seorang pejabat Vietnam sebagai mengatakan : "Pada waktu kami menyetujui garis Brévié kami tidak menyadari masalah-masalah perairan teritorial, landas kontinen dan seterusnya — gejala-gejala baru."<sup>3</sup>

Sambil menunjukkan bahwa perselisihan lepas pantai itu penting baginya, medio 1977 Vietnam menunjuk ketua delegasinya ke Konperensi Hukum Laut untuk Kedutaan Besar di Phnom Penh. Ini terjadi tidak lama setelah ia meng-klaim zone ekonomi lepas pantai 200 mil pada bulan Mei 1977, yang bersama-sama dengan klaim Muangthai yang baru saja diajukan, hanya akan membiarkan satu segitiga laut dan dasar laut yang

1 Lihat *Vietnamese Studies*, 28, 1970

2 J.R.V. Prescott, "Asia's Maritime Boundary Problem," *loc. cit.*; lihat juga peta dalam *Vietnamese Studies*, 28, 1970.

3 *Far Eastern Economic Review*, 3 Februari 1978, hal. 23

kecil di tangan Kamboja. Kamboja rupanya baru menyebutkannya secara terang-terangan sebagai lawan ketika Menlu Vietnam menandatangani suatu komunike bersama dengan Indonesia dan Muangthai serta berjanji akan merundingkan sengketa-sengketa maritim secara damai.

### Gerakan-gerakan Pembebasan

Mengenai gerakan-gerakan pembebasan sepanjang daerah-daerah perbatasan yang bisa menimbulkan salah paham, yang paling penting terdapat dalam suatu daerah yang sebagian besar penduduknya terdiri atas orang-orang Khmer yang tinggal di Vietnam dan sepanjang perbatasan, distrik-distrik Vietnam Triton dan Tinh Bien antara Hatien dan Chaudoc. Menurut suatu peta Perancis yang diterbitkan tahun 1949 dan suatu peta pemerintah Saigon yang diterbitkan tahun 1972, penduduk distrik-distrik ini hampir seluruhnya orang Khmer.<sup>1</sup> Di daerah ini saja pada bulan Mei 1977 jatuh 40% seluruh korban Vietnam sepanjang perbatasan,<sup>2</sup> dan selama Januari 1978 dalam pertempuran besar-besaran terdapat 'laporan-laporan persisten tentang kekalahan-kekalahan Vietnam' di daerah ini.<sup>3</sup> Alasan-alasan khususnya masih belum jelas, biarpun terdapat petunjuk-petunjuk.

Menurut pembelot-pembelot Khmer, yang laporannya disiarkan lewat radio Phnom Penh Januari 1978, segala sesuatunya tidak baik di antara 700.000 atau lebih orang Khmer yang tinggal di Delta Mekong Vietnam, yang mereka kenal sebagai Kamboja Bawah (Krom). Lewat radio mereka mengatakan bahwa 'gerakan perjuangan Khmer Kamboja Krom' (KKK) yang mempunyai hubungan dengan CIA, masih aktif dan

1 *Carte Ethnolinguistique* (Service Geographique de l'Indochine, 1949). *An Annotated Atlas of the Republic of Vietnam*, (Kedutaan Besar Amerika Serikat di Saigon, 1972), hal. 40

2 *Facts and Documents on Democratic Kampuchea's Serious Violations of the Sovereignty and Territorial Integrity of the Socialist Republic of Vietnam* (Kemlu Vietnam, 6 Januari 1978)

3 *Asiaweek*, 27 Januari 1978, hal. 20

bulan April 1976 bahkan 'menjadi kuat melawan penguasa-penguasa Vietnam'. Dengan basis di daerah 'Tujuh Pegunungan' dari distrik-distrik Triton dan Tinh Bien, gerakan itu melakukan perlawanan bersenjata melawan kaum komunis Vietnam. Sumber-sumber pengungsi yang independen melaporkan suatu serangan terhadap suatu pos artileri perbatasan Vietnam di daerah itu pada 5 Mei 1977 yang berhasil menghancurkan sejumlah meriam.<sup>1</sup> Serangan ini tidak disebutkan dalam daftar lengkap laporan pelanggaran perbatasan oleh orang-orang Kamboja, dan oleh sebab itu rupanya dilakukan oleh gerakan KKK. Akan tetapi bulan Nopember 1977 KKK mengalami kekalahan demi kekalahan, pemimpinnya tewas dalam aksi, dan tentara pembebasan terpecah. Kemudian empat anggota pimpinannya yang selamat direkrut oleh Vietnam sebagai mata-mata di Kamboja, dan mereka semuanya membelot ke pihak Kamboja pada bulan Desember 1977.<sup>2</sup> Suatu pertempuran besar berkobar di daerah ini pada 16 Juni 1978.

### Penentuan Perbatasan dan Demarkasi

Dalam pernyataan mereka pada 20 Januari 1978, Vietnam mengatakan bahwa peta perbatasan Kamboja yang resmi yang diterbitkan tahun 1977 'tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah'. Suatu penelitian menunjukkan bahwa peta itu dalam dua hal menyimpang dari peta-peta perbatasan kedua negara yang lama. Yang pertama adalah perbatasan maritim yang dibicarakan di atas.

Yang lain adalah apa yang dalam peta-peta sebelumnya dilukiskan sebagai salient propinsi Vietnam Tay Ninh yang menonjol di propinsi Kamboja Kompong Cham. Lima peta yang berlainan memberikan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Semua berbeda pendapat mengenai hubungan antara perbatasan dan sebuah sungai di daerah itu, biarpun setuju bahwa perbatasan tidak mengikuti sungai itu. Ini adalah penting karena

1 Laporan *New York Times* dalam *Sydney Morning Herald*, 10 Agustus 1977

2 *Evidence on the Vietnamese Aggression against Democratic Kampuchea* (Kemlu Kamboja, Pebruari 1978), hal. 1-63

penguasa-penguasa kolonial Perancis rupanya tidak pernah menempatkan satu dari dua tanda yang dimaksud untuk menggariskan perbatasan salient yang menyerupai kotak ini.<sup>1</sup> Sementara peta itu juga menunjukkan sejumlah desa dengan nama Khmer sedikit dalam wilayah Vietnam. Desa serupa itu rupanya paling tidak merupakan salah satu sebab perbedaan dalam bentuk salient di berbagai peta itu. Tingginya prosentase Khmer di antara penduduk daerah itu, yang dicatat pada tahun 1949 dan 1972 dalam peta-peta tersebut, lebih mempersulit persoalannya. Menyusul perundingan-perundingan tahun 1966, Vietnam di muka umum mengakui kedaulatan Kamboja atas desa-desa Khmer di daerah-daerah sengketa di perbatasan itu.

Peta-peta Front Persatuan Nasional Kamboja dan komunis, yang diterbitkan sesudah 1970 tetapi mungkin menunjukkan perbatasan-perbatasan yang sama seperti peta yang diterbitkan oleh pemerintah Sihanouk, semuanya menunjukkan salient itu sebagai wilayah Kamboja. Keyakinan Kamboja bahwa daerah ini jelas miliknya mungkin menerangkan banyaknya korban sipil Vietnam (sampai 50% seluruh korban sipil sepanjang seluruh perbatasan pada tahun 1977) yang jatuh di daerah ini. Vietnam mengatakan bahwa pasukan-pasukan Kamboja menyerangnya untuk mendudukinya. Ini berlainan dengan maksud penghancuran yang menurut Vietnam di belakang serangan-serangan Kamboja terhadap sasaran-sasaran militer Vietnam di tempat-tempat lain sepanjang perbatasan.<sup>2</sup>

Suatu peta Vietnam dengan serangan-serangan Kamboja setempat menunjukkan adanya usaha untuk merebut salient yang berbentuk kotak ini dari kekuasaan Vietnam. Daerah ini adalah salah satu tempat persembunyian Vietnam yang penting selama perang anti Amerika. Rupanya Vietnam memanggil pulang pasukan-pasukannya dari tempat-tempat persembunyian di Kamboja itu sesudah perang, tetapi tidak langsung; sementara

1 Lihat peta no. 4 dalam Sarin Chhak, *Les Frontiers du Cambodge* (Paris, 1966). Untuk bagian ini dan berikutnya saya banyak mengambil dari Stephen R. Heder. Lihat analisisnya dan analisa Lowell Finley mengenai sengketa Kamboja-Vietnam dalam *Southeast Asia Chronicle*, 64, September-Oktober 1978.

2 Lihat ulasan Stephen R. Heder dan Lowell Finley tentang konflik Kamboja-Vietnam dalam *Southeast Asia Chronicle*, 64, September-Oktober 1978.

pasukan Vietnam tetap tinggal di daerah lain untuk suatu periode yang tidak diketahui. Tetapi lebih serius bagi Kamboja adalah pemukiman di daerah ini oleh orang-orang sipil Vietnam, kaum pengungsi yang mengungsi dari peperangan di negeri mereka tetapi tidak kembali ketika perang berakhir. Itulah klaim Kamboja. Di samping itu ada kemungkinan pemukiman bekas penduduk kota di zone-zone ekonomi baru yang ditetapkan oleh pemerintah Vietnam sesudah 1975.

Ini menimbulkan persoalan kelangsungan wilayah Kamboja yang sangat peka, melawan ekspansionisme pemukim-pemukim, seperti orang-orang Kamboja melihatnya. Dalam pandangan mereka inilah cara dengan mana negeri mereka hampir dihapus dari peta (seperti negara tetangga Champa) oleh Vietnam dan Muangthai pada abad ke-19, dan kemudian dipotong oleh Muangthai dalam Perang Dunia II. Nasib Kamboja yang gawat itu merupakan suatu persoalan yang menguasai nasionalisme Khmer.

Sebuah peta yang diterbitkan oleh Paul Hamlyn pada pertengahan 1970-an menunjukkan suatu area Kamboja yang luas sebagai bagian Muangthai, termasuk Battambang; ini jelas merupakan perbatasan yang untuk sementara dianut oleh Muangthai dalam Perang Dunia II. Itu tiga puluh tahun yang lalu. Sejak April 1978 pemimpin-pemimpin Khmer secara terang-terangan berbicara tentang 'membela ras Kamboja' terhadap rencana-rencana Vietnam untuk 'mencaplok seluruh Kamboja dan melenyapkan rasnya pada akhir periode yang telah ditetapkan'; 'membela harkat nasional dan ras Kamboja untuk menjamin kelangsungan hidupnya'. Mereka mengatakan bahwa bangsa Khmer 'tidak menginginkan jiwa bangsa Kamboja dipadamkan', atau rasnya dilenyapkan. Mereka memperjuangkan hak untuk menentukan 'sendiri nasib kita, dan agar ras Kamboja abadi'.

Dengan hubungan ini adanya sengketa perbatasan itu — secara ironis — rupanya merupakan suatu alasan penting mengapa Kamboja tidak menanggapi seruan Vietnam untuk berunding. Persetujuan-persetujuan tahun 1966-1967 antara pemerintah Vietnam dan pemerintah Kamboja menghasilkan

## ANALISA

pernyataan-pernyataan Vietnam bahwa dia mengakui dan berjanji akan menghormati 'keutuhan wilayah Kamboja dengan perbatasannya sekarang ini'. Ini adalah pernyataan-pernyataan *unilateral* (Kamboja tidak mengakui perbatasan-perbatasan Vietnam) dan sebagai tanggapan Kamboja setuju untuk secara permanen membekukan klaim-klaimnya atas 'wilayah-wilayah yang hilang' seperti Delta Mekong dan daerah-daerah kecil yang secara tidak sah dipindahtangankan kepada Vietnam oleh Perancis antara 1870 dan 1914.

Ini berarti bahwa Kamboja secara formal menganggap bahwa perbatasan-perbatasannya tidak boleh dilanggar, tidak boleh diubah dan tidak boleh disentuh, yaitu bahwa perbatasan-perbatasan itu tidak boleh disentuh oleh perundingan-perundingan untuk disesuaikan lebih lanjut. Sebagai akibatnya Kamboja memegang hak untuk memutuskan (demi keuntungannya) hal-hal yang tidak pasti dalam penentuan tapal-tapal batas. Hal-hal tidak pasti ini sudah barang tentu kecil (salient propinsi Tay Ninh rupanya merupakan kasus khusus) karena penentuan Perancis dalam kebanyakan hal cukup jelas. Akan tetapi pentingnya hak ini untuk Kamboja tidak dapat dipersoalkan, seperti dijelaskan oleh seorang editor pemerintah pada tahun 1969 dalam periode Sihanouk :

"Kebanyakan pemerintah asing menganggap bahwa Kamboja tidak begitu sehat karena memberikan arti yang tidak semestinya kepada 'beberapa pulau kecil yang tidak dihuni,' beberapa acre hutan, dan bahkan kepada beberapa batu kuno (Preah Vihear). Mengapa tidak melepaskan semuanya ini untuk mereka yang menginginkannya, karena bukanlah ini harga, dengan biaya minimal, untuk memulihkan hubungan baik dengan tetangga-tetangga? Orang-orang Thai dan Vietnam . . . . tak henti-hentinya menyatakan itikad baik mereka terhadap Kamboja, keinginan mereka untuk menyelesaikan untuk selamanya masalah perbatasan dalam semangat persahabatan . . . . (Orang-orang lain) tidak mengerti mengapa Kamboja tidak mau menganut pandangan yang luas . . . . Soalnya bukanlah harga tanah yang diklaim tetapi lebih banyak. Di Saigon maupun Bangkok, (mereka) hanya akan memperhatikan minimum kepuasan yang bersumber pada klaim-klaim ini sebagai suatu tanda bahwa Kamboja *mulai* 'mengurangi kekerasannya. . . .' Adalah pasti bahwa penyerahan suatu potong tanah nasional akan mengakibatkan suatu kejutan psikologis bagi orang-orang Khmer maupun perasaan tak berdaya terhadap maksud-maksud ekspansionis tetangga-tetangga mereka . . . . cara tradisional yang digunakan Kerajaan Annam . . . . adalah 'menyerobot' tanpa henti-hentinya. Klaim-klaim yang aktual adalah 'modest dan masuk akal. . . .' tetapi kita mengetahui dari pengalaman bahwa cara yang dimulai secara ini secara tak terhindarkan berakhir dengan aneksasi daerah-daerah, kemudian propinsi-propinsi dan akhirnya seluruh tepi kiri sungai Mekong. . . .

Tetapi Kamboja . . . . tidak bermaksud jatuh ke dalam perangkap tetangga-tetangganya dan juga tidak ingin menjadi korban kecurangan diplomasi. Perbatasannya sekarang ini adalah garis pertahanan Khmer yang terakhir . . . . menerima baik usul untuk berunding . . . . akan merupakan suatu pengakuan kekalahan terakhir secara diam-diam”.<sup>1</sup>

Orang-orang Kamboja rupanya merasa bahwa Vietnam akan melakukan yang sama pada tahun 1978. Bagaimana pun juga, adalah jelas bahwa orang-orang Kamboja memandang perbatasan-perbatasan sebagai tak dapat ditawar-tawar ketika mereka menghentikan perundingan-perundingan di Phnom Penh tahun 1976 segera setelah jelas bahwa Vietnam bermaksud 'menggariskan kembali' perbatasan maritim.

Kamboja memutuskan hubungan diplomasi dengan Vietnam pada 31 Desember 1977. Pada hari itu Vietnam, Laos dan Muangthai membentuk suatu Komite Proyek Pembangunan Mekong 'sementara,' untuk memanfaatkan potensi hidrolistrik dan irigasi yang luar biasa dari sungai itu. Kamboja menolak untuk bergabung dengan komite ini dan kemungkinan bahkan melihat proyek itu sebagai ancaman berat bagi kemerdekaannya. Pada tahun 1972 suatu tinjauan Bank Dunia mengenai rencana-rencana pembangunan Mekong itu mengemukakan bahwa rencana pembangunan dua bendungan besar, satu di Stung Treng di Kamboja, akan menggusur 700.000 orang Khmer dan petani Lao. Akan tetapi keuntungan pokoknya akan jatuh di tangan Saigon dan Bangkok. Tinjauan itu melanjutkan : "Karena Vietnam maupun Muangthai mengandalkan instalasi-instalasi jauh di pedalaman Kamboja, pemimpin-pemimpin Kamboja akan menghadapi pilihan melayani kepentingan-kepentingan saingan-saingan mereka — atau akibat-akibat militer dan politiknya kalau mereka menolaknya."<sup>2</sup>

Pendek kata, terdapat banyak perbedaan penting antara pemerintah Kamboja dan pemerintah Vietnam, historis, teritorial dan ideologis. Yang kurang jelas ialah apakah per-

1 *Kamboja*, Phnom Penh, 15 Juni 1968, hal. 16-17

2 Surat-surat dalam *Far Eastern Economic Review*, 1 September 1978

bedaan-perbedaannya itu sendiri adalah fundamental, ataukah akibat faktor-faktor lain 'pertentangan-pertentangan antara orang-orang' itu menjadi 'pertentangan-pertentangan per-musuhan'<sup>1</sup>

### III. PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA

Sengketa Kamboja-Vietnam itu meningkat secara dramatis menjadi perang terbuka pada 25 Desember 1978 ketika Vietnam melancarkan suatu invasi besar-besaran dan rezim Pol Pot memberikan perlawanan sengit. Maksud Vietnam ialah menyelesaikan sengketa dengan kekerasan senjata dalam rangka realisasi cita-cita federasi Indocina di bawah dominasinya dan pengamanan sisi Barat Daya-nya sehubungan dengan sengketanya dengan RRC. Kamboja bukan saja merupakan hambatan utama bagi realisasi cita-cita federasi itu, melainkan juga mengancam keamanannya, khususnya karena bersekutu dengan RRC yang mengancamnya dari sebelah utara.

Dalam suatu blitzkrieg Vietnam berhasil merebut Phnom Penh dan mensponsori dibentuknya suatu pemerintah baru di bawah pimpinan PM Heng Samrin yang pro Hanoi. Akan tetapi sejauh ini dia tidak berhasil mencapai maksudnya itu karena pasukan-pasukan Pol Pot memberikan perlawanan gigih dan dalam hal ini dapat mengharapakan dukungan rakyat yang anti Vietnam. Dalam keadaan itu harapannya untuk menyelesaikan kampanye ini sebelum musim hujan gagal. Kekuatan pansernya menjadi lumpuh dan pasukan-pasukan Pol Pot bukan saja dapat bernafas lagi melainkan juga melancarkan serangan-serangan balasan untuk merebut kembali daerah-daerah yang diduduki musuh. Secara demikian peperangan menjadi berlarut-larut dan banyak menghabiskan tenaga Vietnam.<sup>2</sup>

---

1 Untuk analisa kemudian mengenai apa yang pada hemat saya adalah faktor-faktor yang lebih mendasar dalam konflik itu, lihat *Nation Review*, 17-23 Nopember 1978, hal. 8.

2 Lihat *Time*, 30 Juli 1979.

Perekonomian Vietnam, yang telah banyak menderita sebagai akibat panen buruk beberapa tahun dan salah urus yang berat, menjadi semakin parah. Selain itu invasi Kamboja ini memancing invasi RRC ke Vietnam Utara yang banyak menimbulkan kerusakan serta mengganggu perekonomiannya, khususnya karena Vietnam terpaksa mengadakan mobilisasi untuk menghadapi ancaman RRC itu. Beberapa minggu kemudian RRC menarik pasukan-pasukannya dari wilayah Vietnam, tetapi keadaan tetap tegang karena Vietnam menolak tuntutan yang diajukan RRC sebagai syarat perdamaian agar menarik pasukan-pasukannya dari Kamboja maupun Laos. Dalam situasi ini RRC menempatkan ratusan ribu pasukan di daerah-daerah perbatasannya dengan Vietnam dan Laos, dan Vietnam harus bersiap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan.

Sementara itu keadaan di Kamboja tetap memusingkan Hanoi. Sisa-sisa pasukan Pol Pot masih mampu mengganggu pasukan-pasukan Vietnam yang menjadi setengah lumpuh akibat musim hujan, sedangkan pemerintah Heng Samrin tidak berhasil mendapat dukungan rakyat yang luas karena dianggap sebagai boneka Vietnam musuh mereka. Bulan Juni pasukan-pasukan Khmer yang dianggap loyal terhadap Heng Samrin mengusir garnisun Vietnam di pelabuhan Kratie. Walaupun berhasil merebutnya kembali dengan cepat, Vietnam terkejut juga dan mendatangkan pasukan-pasukan Pathet Lao dari Laos. Akan tetapi ini berarti bahwa Hanoi berusaha mengisi satu kantong dengan mengosongi kantong lain. Pasukan-pasukan Pathet Lao itu dibutuhkan di Laos Utara di mana suku-suku yang didukung RRC menyelundupkan senjata untuk gerilyawan-gerilyawan suku Meo yang anti Vietnam.<sup>1</sup> Lagi pula RRC memusatkan pasukan-pasukan dekat perbatasan dan sewaktu-waktu dapat menyerbu Laos untuk mengusir pasukan-pasukan Vietnam yang ditempatkan di negara itu dan secara demikian menggagalkan ambisi hegemoni Vietnam di Indocina.

Selain itu dunia internasional umumnya mengecam invasi Vietnam di Kamboja itu dan menuntut agar pasukan-

---

1 *Ibid.*

## ANALISA

pasukannya ditarik mundur. Kebanyakan negara menolak mengakui pemerintah Heng Samrin dan membela hak bangsa Kamboja untuk menentukan nasibnya sendiri. Intervensi Vietnam di Kamboja dinilai sebagai melanggar kedaulatan dan kemerdekaan negara ini dan harus segera mungkin dihentikan.

Dengan demikian Vietnam mendapat banyak tekanan agar merubah kebijaksanaannya terhadap Kamboja. Rupanya juga tidak ada pilihan lain baginya. Tanpa perubahan itu dia akan menghadapi bencana baik militer maupun politik dan ekonomi. Dalam keadaan itu Vietnam kiranya akan dapat menerima suatu penyelesaian politik berupa pembentukan suatu pemerintah koalisi yang netral di Kamboja. Dengan jaminan bahwa pemerintah koalisi serupa itu tidak anti Vietnam dan pro Peking, dia kiranya akan bersedia menarik pasukan-pasukannya.<sup>1</sup> Suatu Kamboja netral serupa itulah juga yang diinginkan oleh negara-negara ASEAN, khususnya Muangthai. Sebagai negara netral, Kamboja dapat berfungsi sebagai penyangga antara negara-negara itu dan Vietnam yang telah muncul sebagai kekuatan dominan di kawasan, dan berkat kekuatan militernya bisa mempunyai ambisi ekspansionis.

---

1 Lihat *Far Eastern Economic Review*, 6 Juli 1979; lihat juga *Foreign Report*, 18 Juli 1979